



Article Informations
Corresponding Email:
sintania.personal@gmail.com

Received: 31/05/2026; Accepted:
06/06/2026; Published: 30/06/2026

STRATEGI INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN DRUG TRAFFICKING MELALUI ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUG MATTERS (ASOD) PADA TAHUN 2016-2020

Mutiara Rachmah Nuraini

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia menangani perdagangan narkoba transnasional melalui kerja sama regional dengan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) selama periode 2016–2020, dengan menggunakan pendekatan Neoliberalisme Institusional dan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berperan aktif melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), penguatan penegakan hukum, serta kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, efektivitas kerja sama regional antara Indonesia dan ASOD masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta meningkatnya penggunaan metode digital oleh para pelaku perdagangan narkoba. Kerja sama antara Indonesia dan ASOD dinilai cukup efektif dalam memperkuat koordinasi di tingkat regional, tetapi masih kurang efektif dalam mengurangi kasus terkait narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang bebas dari narkoba.

Kata Kunci: Indonesia; Perdagangan Narkoba Transnasional; ASEAN; ASOD; Kerja Sama Regional; Neoliberalisme Institusional; P4GN.

Abstract

This study examines how Indonesia addresses transnational drug trafficking through regional cooperation with the ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) during the 2016–2020 period, using the Institutional Neoliberalism approach and a descriptive qualitative method. The findings show that Indonesia has been active through the P4GN program, strengthening law enforcement, and collaborating with the National Narcotics Board (BNN), the National Police, the Armed Forces (TNI), and Customs. However, the effectiveness of the regional by Indonesia and ASOD is constrained by limited resources, weak of surveillance, and growing use of digitals methods by traffickers. Cooperation between Indonesia and ASOD has been relatively effective in strengthening regional coordination, but it has been less effective in

reducing drug related cases in Indonesia. It requires stronger commitment among ASEAN member states to achieve a drug-free region.

Keywords: Indonesia; Transnational Drug Trafficking; ASEAN; ASOD; Regional Cooperation; Institutional Neoliberalism; P4GN.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan globalisasi mendorong perubahan dalam praktik hubungan internasional. Hubungan antar negara tidak lagi sebatas diplomatik semata namun merambah ke berbagai aspek mulai dari ekonomi, budaya, keamanan, hingga isu-isu internasional lainnya yang menjadikan hubungan internasional menjadi lebih kompleks.

Tidak hanya berdampak pada aspek-aspek positif, perkembangan zaman yang cepat juga memberikan dampak kepada permasalahan internasional berupa ancaman politik, masyarakat, budaya, ekonomi, hingga kejahatan internasional yang dapat mengancam keamanan suatu negara dan dapat membahayakan masyarakat.¹ Sehingga setiap negara memiliki kebijakan khusus untuk mencapai kepentingan nasional untuk melindungi warga negaranya.

Keamanan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap negara, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan politik luar negeri setiap negara mencantumkan keamanan sebagai salah satu kepentingan nasional yang harus dijaga dan dicapai oleh negara. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat juga dapat meningkatkan

¹ Keith, K. 2012. *Culture and Security: Multilateralism, Arms Control and Security Building*. London: Frankas Publishing.

mobilitas sosial sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dunia internasional yang berdampak juga di bidang kejahatan internasional.²

Kejahatan transnasional menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh yang besar terhadap stabilitas keamanan internasional.³ Perdagangan hingga penyelundupan manusia, senjata, obat-obatan terlarang dan pencucian uang yang melintasi batas teritorial suatu negara menjadi ancaman yang sangat berbahaya karena dapat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara.

Masalah keamanan non-tradisional dengan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam dunia internasional setelah berakhirnya Perang Dingin. Seperti militer yang lebih tradisional dan ancaman keamanan eksternal lainnya, ancaman nontradisional ini, baik yang bersifat nasional maupun transnasional, mampu menciptakan dampak politik, militer, ekonomi dan sosial yang menghancurkan dengan melemahkan hukum dan ketertiban negara-bangsa tertentu.

Indonesia sendiri menganggap ASEAN sebagai kepentingan yang dapat mempengaruhi keamanan nasional di kawasan. Tidak hanya Indonesia, untuk memenuhi keamanan demi mencapai kepentingan nasional setiap negara-negara anggota, dibentuknya deklarasi ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality) pada tahun 1971 yang difokuskan untuk

² Wardoyo, Broto. 2015. Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia. Nugra Media

³ Jenner, M. 2013. *Handbook of Transnational Crime and Justice*, USA.

membahas proyeksi kepentingan keamanan nasional yang ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN.⁴

2. PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua Asia dan benua Australia dan juga diantara dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terletak dengan posisi silang menyebabkan Indonesia memiliki pengaruh penting terhadap iklim dan perekonomian. Memiliki posisi yang strategis sangat menguntungkan Indonesia dalam segi pendapatan dikarenakan menjadikan lautan Indonesia menjadi jalur lalu lintas internasional dan menjadi tempat persinggahan kapal laut yang menempuh perairan dari Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat hingga Afrika dan Eropa.

Disisi lain memiliki Kawasan yang strategis tidak hanya meraup keuntungan saja, namun juga berefek samping kepada kejahatan-kejahatan transnasional yang dapat mengancam keamanan nasional Indonesia termasuk narkoba. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan utama untuk peredaran narkoba maupun persinggahan dari sindikat-sindikat internasional untuk menuju tujuan utama salah satunya kawasan Eropa.

Peningkatan kasus penyelundupan dan peredaran di Indonesia terjadi karena banyaknya pelabuhan baru yang bermunculan dipesisir namun tidak memiliki izin resmi sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia sulit untuk mengontrol transaksi narkoba yang terjadi pada pelabuhan ilegal tersebut.

⁴ Henry Kissinger, *World Order* (New York: Penguin Book, 2014), 364.

Selain itu meningkatnya jumlah pariwisata yang berkunjung ke Indonesia juga mempengaruhi meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia.

Peran ASOD di ASEAN telah tertuang dalam dalam “ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug and Illicit Trafficking” yang menjelaskan bahwa ASOD memiliki tiga variabel utama yakni kebijakan, pendekatan dan strategi. Luasnya jaringan serta permasalahan narkoba mulai dari produksi, distribusi hingga penyalahgunaan narkoba sehingga membutuhkan upaya yang efektif, didukung dengan data yang akurat, sehingga ASOD setiap tahun menyelenggarakan pertemuan guna mengetahui perkembangan kejahatan narkoba di masing-masing negara anggotanya. Mekanisme kerja ASOD yaitu badan yang dibentuk untuk bertugas membuat agenda pertemuan-pertemuan dengan negara anggota, dimulai dengan presentasi mengenai country report, membuat dan merencanakan proyek kerjasama yang terkait dengan penanggulangan kejahatan narkoba dan mengkaji kembali implementasi terkait rekomendasi-rekomendasi dan diskusi hasil working group yang diwadahi oleh ASOD itu sendiri.

ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016 - 2025 diangkat berdasarkan dari the 5th ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) yang merupakan kelanjutan dari ASEAN Work on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Plan Use 2009-2015 yang didalamnya membahas detail komponen dan aktivitas yang disarankan untuk mengefektifkan implementasi penanganan masalah narkoba dan mengurangi konsekuensi dampak negatif terhadap masyarakat yang kemudian disusun menjadi matriks rencana kerja.

Implementasi ASOD terhadap mengatasi kejahatan penyalahgunaan narkoba terlihat kurang berdampak dilihat dari data kasus kejahatan narkoba yang terjadi di Indonesia yang setiap tahunnya cenderung naik, dan pada tahun 2018, merupakan puncak tertinggi terjadinya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sehingga di Indonesia sendiri masih tingginya kasus produksi narkoba dan permintaan narkoba dengan harga yang tinggi.

Kemudian dilihat juga dari variabel struktural dan variabel kontekstual, yang juga menjelaskan peran organisasi, ASOD dilihat dari beberapa ukuran variabel struktural seperti struktur keorganisasian, kompetensi formal, ketersediaan sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan cenderung tidak efektif. Struktur organisasi yang hanya melakukan pertemuan tidak mengikat negara anggotanya, tugas dan perannya pun tidak mewajibkan serta kurangnya komitmen negara-negara anggota, dan minimnya dana. Dilihat juga dari variabel kontekstual yang dilihat dari isi joint declaration 1998, yang berisi imbauan kepada ASOD untuk meningkatkan kerjasama. Serta mengatasi masalah Narkoba hanya berisikan himbauan, upaya, dan saran. Jadi tidak terlihat mengikat.

Strategi Indonesia dalam forum ASOD pada dasarnya menekankan tiga dimensi utama: diplomasi multilateral, integrasi kebijakan domestik-regional, dan pendekatan komprehensif dalam pemberantasan narkoba. Dari segi diplomasi, Indonesia aktif mengusulkan agenda-agenda baru di forum ASOD, salah satunya pada pertemuan ASOD ke-39 di Jakarta tahun 2018 yang menekankan pentingnya memperhatikan cyber-enabled drug trafficking. Isu ini krusial karena data UNODC mencatat peningkatan 35% transaksi narkoba melalui darknet di kawasan Asia Tenggara sepanjang

2016–2020.⁵ Dengan mendorong agenda ini, Indonesia ingin memperlihatkan kepemimpinannya dalam adaptasi terhadap ancaman baru.

Integrasi kebijakan domestik juga terlihat dari sinkronisasi Program P4GN dengan ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016–2025. Program P4GN yang menekankan pencegahan di sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat dilaporkan secara rutin dalam forum ASOD. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan akuntabilitas nasional, tetapi juga memperkuat legitimasi forum regional.⁶

Selain itu, strategi Indonesia memperluas peran aktor domestik seperti BNN, Polri, TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi dalam implementasi ASOD. Salah satu capaian penting adalah keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Seaport Interdiction Task Force yang berhasil meningkatkan deteksi penyelundupan narkoba di pelabuhan laut. Data BNN menyebutkan bahwa pada tahun 2019, lebih dari 70% penyelundupan narkoba ke Indonesia berhasil digagalkan di pelabuhan laut, angka yang lebih tinggi dibanding jalur udara maupun darat.⁷ Dengan strategi ini, Indonesia berusaha tidak hanya memanfaatkan ASOD sebagai forum formal, tetapi juga sebagai instrumen operasional yang berdampak langsung pada upaya pemberantasan narkoba.

Kinerja Indonesia dalam periode ini dapat dilihat dari tiga capaian utama: penegakan hukum, pencegahan & rehabilitasi, serta diplomasi regional. Dari sisi penegakan hukum, operasi gabungan yang difasilitasi

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Synthetic drugs in East and Southeast Asia: Trends and patterns of amphetamine-type stimulants and new psychoactive substances*. Vienna: UNODC.

⁶ ASEAN Secretariat. (2019). *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016–2025*. Jakarta: ASEAN.

⁷ Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: BNN.

ASOD berkontribusi pada sejumlah keberhasilan besar. Misalnya, pada 2018 aparat gabungan BNN dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 1,6 ton sabu di Batam setelah memperoleh informasi intelijen dari jaringan ASOD.⁸ Kasus serupa terjadi pada 2019, ketika BNN berhasil mengungkap 2,5 ton sabu dari Myanmar yang masuk melalui Sumatera Utara. Kedua kasus ini menjadi bukti nyata bahwa intelligence sharing di bawah ASOD dapat meningkatkan efektivitas operasi nasional.

Pada bidang pencegahan, Indonesia mengusung pendekatan berbasis komunitas yang disampaikan dalam forum ASOD. Program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) misalnya, dipresentasikan sebagai model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba. Program ini kemudian menarik minat beberapa negara anggota ASEAN lain, seperti Filipina, untuk mengadopsinya di tingkat lokal.⁹

Di bidang rehabilitasi, Indonesia melaporkan keberhasilan rehabilitasi lebih dari 23.000 pecandu melalui pusat rehabilitasi nasional di Lido dan Balai Besar Rehabilitasi BNN sepanjang 2016–2020.¹⁰ Program ini menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam memperkuat demand reduction di kawasan.

Capaian diplomasi juga signifikan. Dengan menjadi tuan rumah pertemuan ASOD ke-39, Indonesia berhasil memasukkan isu keamanan siber dalam agenda regional. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam ASEAN Plus dengan mitra dialog seperti Tiongkok dan Jepang. Misalnya, melalui

⁸ BBC Indonesia. (2018, Februari 23). "BNN gagalkan penyelundupan 1,6 ton sabu di Batam."

⁹ Badan Narkotika Nasional. (2020). *Program Desa Bersinar: Strategi Pencegahan Narkoba Berbasis Komunitas*. Jakarta: BNN

¹⁰ Badan Narkotika Nasional. (2021). *Statistik Rehabilitasi Narkoba 2016–2020*. Jakarta: BNN.

kerja sama dengan Jepang, Indonesia memperoleh bantuan teknologi deteksi narkoba di pelabuhan, sementara dengan Tiongkok Indonesia menjalin kolaborasi dalam pemantauan prekursor narkoba.¹¹

Selama periode penelitian, Indonesia berhasil mencatat beberapa capaian penting. Pertama, melalui partisipasi aktif di ASOD, Indonesia terlibat dalam sejumlah operasi gabungan, termasuk *controlled delivery* yang melibatkan Malaysia dan Singapura. Operasi ini berhasil membongkar jaringan sindikat besar dengan penyitaan lebih dari 2 ton sabu pada tahun 2019.¹²

Kedua, dari sisi rehabilitasi, Indonesia memperluas layanan melalui program *Desa Bersinar* (Desa Bersih Narkoba) yang mulai dijalankan pada 2018. Program ini melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengintegrasikan pencegahan narkoba dalam pembangunan desa. Hasilnya, pada 2020 terdapat lebih dari 200 desa yang menjadi percontohan.¹³

Ketiga, dalam aspek pencegahan, Indonesia berperan aktif dalam kampanye *Drug-Free ASEAN 2025*. Melalui kerja sama dengan ASOD, Indonesia menghasilkan modul edukasi yang disebar di sekolah menengah di beberapa provinsi. Modul ini menekankan bahaya narkoba sintetis yang semakin marak di Asia Tenggara.¹⁴

Meskipun terdapat capaian yang signifikan, strategi Indonesia dalam ASOD masih menghadapi banyak hambatan. Dari aspek politik, prinsip *non-interference* ASEAN membatasi ruang gerak ASOD. Negara anggota tidak bisa

¹¹ ASEAN Secretariat. (2019). *ASEAN Cooperation on Drugs: Achievements and Challenges*. Jakarta: ASEAN.

¹² Kementerian Desa RI. (2020). *Program Desa Bersinar 2018–2020*.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ ASEAN Secretariat. (2018). *Drug-Free ASEAN Campaign Report*.

dipaksa mengadopsi standar yang sama, sehingga implementasi kebijakan sering kali timpang. Contohnya, sementara Indonesia menegakkan hukuman mati, negara seperti Laos lebih lunak karena keterbatasan aparat dan tekanan internasional.¹⁵

Meski mencatat sejumlah capaian, strategi Indonesia juga menghadapi keterbatasan. Pertama, keterbatasan anggaran membuat kapasitas patroli laut dan udara belum memadai untuk mengawasi jalur masuk narkoba. Menurut BNN, hanya 30% jalur laut rawan yang dapat diawasi secara rutin pada 2019.

Kedua, lemahnya koordinasi data antarinstansi menjadi hambatan besar. BNN, Polri, Bea Cukai, dan Imigrasi belum memiliki sistem pertukaran data real-time. Hal ini mengakibatkan beberapa operasi gabungan tidak optimal karena keterlambatan informasi.¹⁶

Ketiga, stigma sosial terhadap pengguna narkoba masih kuat sehingga kebijakan rehabilitasi tidak sepenuhnya berjalan efektif. Banyak pengguna memilih menghindari layanan rehabilitasi karena khawatir dengan stigma dan diskriminasi.

Dari aspek ekonomi, anggaran BNN masih relatif kecil. Pada 2020, BNN hanya memperoleh alokasi sekitar Rp1,9 triliun, jumlah yang jauh dari cukup untuk membiayai operasi, rehabilitasi, dan kampanye pencegahan secara nasional.¹⁷ Dari aspek sosial, stigma masyarakat terhadap pecandu narkoba menghambat efektivitas program rehabilitasi. Banyak pengguna enggan melapor karena takut dipenjara, sehingga target rehabilitasi tidak optimal.

¹⁵ Jones, D. M. (2018). *ASEAN and the limits of regionalism*. Cambridge: Cambridge University Press

¹⁶ CNN Indonesia. (2020). *Data intelijen narkoba belum terintegrasi*.

¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Nota Keuangan dan APBN 2020*. Jakarta: Kemenkeu

Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan serius. Laporan UNODC (2020) menyoroti bahwa sindikat narkoba di Asia Tenggara semakin banyak menggunakan *cryptocurrency* dalam transaksi, sementara kapasitas aparat Indonesia dalam hal *cyber intelligence* masih terbatas.¹⁸ Hambatan lain adalah koordinasi antarinstansi di dalam negeri. Terdapat indikasi ego sektoral antara BNN, Polri, dan TNI yang membuat pertukaran data tidak selalu lancar. Hal ini menyebabkan respons terhadap ancaman narkoba sering kali lambat.

Untuk memastikan keberlanjutan strategi, diperlukan roadmap yang jelas. Dalam jangka pendek (0–6 bulan), Indonesia dapat memulai dengan membangun MoU pusat data intelijen nasional. Dalam jangka menengah (6–18 bulan), Indonesia mendorong uji coba ASEAN Narcotics Data Center bersama negara mitra. Sementara dalam jangka panjang (18–36 bulan), diperlukan harmonisasi standar regional, khususnya terkait operasi controlled delivery dan patroli laut gabungan.

Strategi Indonesia dalam pemberantasan narkotika melalui ASOD pada periode 2016–2020 memperlihatkan capaian signifikan dalam aspek operasi gabungan, peningkatan kapasitas, dan perluasan rehabilitasi. Namun, sejumlah hambatan masih membatasi efektivitas, antara lain keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi data, dan adaptasi cepat sindikat terhadap teknologi.

Analisis menunjukkan bahwa meskipun ASOD tidak memiliki mekanisme yang mengikat, forum ini tetap menjadi instrumen penting bagi

¹⁸ UNODC. (2020). *Darknet and cryptocurrencies in Southeast Asia*. Vienna: UNODC.

Indonesia untuk memperkuat strategi nasional sekaligus berkontribusi dalam upaya regional. Rekomendasi kebijakan yang diajukan dapat menjadi landasan bagi penguatan strategi di masa mendatang, baik di tingkat domestik maupun regional, menuju tercapainya visi ASEAN bebas narkoba pada 2025.

3. KESIMPULAN

Terbentuknya ASOD sebagai forum regional ASEAN membuktikan bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki permasalahan yang sama yaitu terkait permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Negara-negara di ASEAN menyadari bahwa permasalahan terkait kejahatan narkoba bersifat kompleks, transnasional, dan sulit jika hanya ditangani secara uniteral.

Melalui penelitian ini dapat ditarik beberapa Kesimpulan yang sama mempresentasikan efektivitas kerja sama yang terjalin antara ASOD dan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari strategi yang dijalankan oleh Indonesia dan ASOD menggunakan pendekatan kerja sama regional untuk menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, pertukaran informasi, hingga penguatan kerangka hukum. Strategi ini sesuai dengan pendekatan neoliberalisme institusional yang menekankan peran organisasi internasional sebagai wadah kerja sama kolektif.

Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan ASOD terdapat capaian yang diperoleh yaitu terjalinnya, pendidikan pencegahan, rehabilitasi, serta penelitian bersama. Indonesia berperan aktif dalam mendorong program *P4GN* (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), memperkuat pertukaran data informasi, serta menginisiasi

sejumlah kegiatan yang melibatkan aktor negara maupun non-negara. Kerja sama yang terjalin dengan ASOD juga membuat Indonesia dapat kesempatan untuk melakukan koordinasi dengan lembaga sejenis dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Meskipun terdapat pencapaian dalam kerja sama antara Indonesia dan ASOD, kerja sama regional yang terjalin dilihat kurang memberikan dampak yang maksimal meskipun telah melaksanakan banyak program kerja sama dan melalui banyak pertemuan karena jika dilihat dari data kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 masih cenderung naik dan tinggi. Selain itu terdapat regulasi nasional yang berbeda diantara negara anggota ASEAN mempersulit untuk mencapai strategi bersama. Evaluasi terhadap strategi Indonesia dalam ASOD dapat dilakukan dengan menggunakan tiga kerangka teoritis yang relevan, yakni Neoliberalisme Institusional, Regime Theory, dan Security Community.

Dengan demikian, evaluasi secara teoritis menunjukkan bahwa strategi Indonesia dalam ASOD memiliki efektivitas parsial. Strategi ini efektif dalam meningkatkan kapasitas teknis dan diplomasi, tetapi belum mampu mewujudkan tujuan kolektif ASEAN, yakni kawasan bebas narkoba pada 2025.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi Indonesia dalam pemberantasan narkoba melalui ASOD pada periode 2016–2020 telah memberikan kontribusi penting, baik dalam aspek diplomasi, penegakan hukum, maupun pencegahan. Indonesia secara konsisten berperan aktif dalam forum ASOD, mengusulkan agenda-agenda baru,

memperkuat kapasitas aparat, serta memperluas kerja sama dengan mitra eksternal.

Capaian konkret terlihat dari keberhasilan Indonesia dalam menggagalkan sejumlah penyelundupan narkoba berskala besar berkat dukungan *intelligence sharing* regional, serta program pencegahan berbasis komunitas yang mendapat pengakuan di tingkat ASEAN. Namun demikian, terdapat hambatan struktural yang membatasi efektivitas, seperti perbedaan kebijakan domestik antarnegara, keterbatasan anggaran, stigma sosial terhadap pecandu, serta perkembangan modus operandi sindikat narkoba berbasis teknologi.

Evaluasi dengan menggunakan teori Neoliberalisme Institusional, Regime Theory, dan Security Community memperlihatkan bahwa strategi Indonesia cukup efektif dalam dimensi teknis dan diplomasi, tetapi kurang efektif dalam menciptakan keseragaman kebijakan regional. Dengan demikian, efektivitas strategi Indonesia dalam ASOD dapat dikategorikan sebagai *moderately effective*: berhasil di level operasional, tetapi belum maksimal di level normatif dan struktural.

Ke depan, efektivitas strategi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan memperkuat koordinasi antarinstansi domestik, memperluas kapasitas teknologi, meningkatkan dukungan anggaran, serta mendorong harmonisasi kebijakan regional ASEAN. Jika hal ini tercapai, peran Indonesia dalam ASOD tidak hanya akan berdampak pada keamanan nasional, tetapi juga pada terciptanya kawasan ASEAN yang lebih tangguh menghadapi ancaman narkoba.

REFERENSI

BUKU

- Clive Archer. 2001. *International Organizations*. New York: Routledge, 2001.
- John W. Creswell. 1998. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five designs*. North America: Sage Publications. Hal.15.
- Jones, D. M. (2018). *ASEAN and the limits of regionalism*. Cambridge: Cambridge University Press
- Keith, K. 2012. *Culture and Security: Multilateralism, Arms Control and Security Building*. London: Frankas Publishing.
- Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye. 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transtition*. Boston: Little Brown, 8.
- Robert O. Keohane. 1989. *Neoliberal Institutionalism: a Perspective on World Politic,* in *International Institution and State Power*. Boulder: Westview Pres, 193.
- Stephen M. Walt. 1998. *International Relation: One World, Many Theories, Foreign Policy, No. 110, special edition: Frontiers of Knowledge* . Spring, 32.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. hal 222.
- Wang, Peng. 2009. Transnational Crime: Its Containment Through International Couperation. *Asian Social Science*, Vol. 5:11.
- Wagley, John. 2006. Transnational Organization Crime: Principal Threats and U.S. Responses. *Congressional Research: The Library of Congress*.

JURNAL

- ASEAN Secretariat. (2019). *ASEAN Cooperation on Drugs: Achievements and Challenges*. Jakarta: ASEAN

Grieco, J. M. 1988. Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism. *International Organization*, Vol. 42: 3, 485–507.

Aggarwal, V. K. 1984. International Regimes. *Political Science Quarterly*, Vol. 99(1), 181–183.

UNODC. 2020. Darknet and cryptocurrencies in Southeast Asia. Vienna: UNODC.

ARTIKEL

Badan Narkotika Nasional. (2020). *Program Desa Bersinar: Strategi Pencegahan Narkoba Berbasis Komunitas*. Jakarta: BNN

Badan Narkotika Nasional. (2021). *Statistik Rehabilitasi Narkoba 2016–2020*.

Jakarta: BNN
Kementerian Keuangan RI. 2020. *Nota Keuangan dan APBN 2020*. Jakarta: Kemenkeu

BBC Indonesia. (2018, Februari 23). "BNN gagalkan penyelundupan 1,6 ton sabu di Batam."

Tempo. 2019. "Koordinasi BNN dan Polri belum optimal."